Turnitin Official

150-158_plagiasi

5. 논문 및 과제 검사 - 검사 후 Turnitin DB 미 저장 (Originality Check - No Repository)

Document Details

Submission ID
trn:oid:::3618:134745308

Submission Date
Apr 10, 2026, 10:52 AM GMT+7

Download Date
Apr 10, 2026, 10:54 AM GMT+7

File Name
150-158_plagiasi.docx

File Size
261.8 KB

9 Pages

3,656 Words

26,218 Characters

18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text

Top Sources

11% Internet sources
10% Publications
14% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

11% Internet sources
10% Publications
14% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1 Publication
M. Alfin Hidayatullah, Hasbullah Malau. "Efektivitas Penyediaan Air Bersih dalam ... 1%

2 Internet
conference.ut.ac.id 1%

3 Internet
gala.gre.ac.uk <1%

4 Internet
jurnal2.untagsmg.ac.id <1%

5 Student papers
Saddleback High School on 2025-08-01 <1%

6 Publication
Silvia Ariani, Lalu Iwan Eko Jakandar, Asfa Fikriah. "Implementation of Discipline-... <1%

7 Internet
eprints.ipdn.ac.id <1%

8 Internet
kampungjurnal.org <1%

9 Publication
Yongdong Shen, Yuan (Daniel) Cheng, Jianxing Yu. "From recovery resilience to tr... <1%

10 Student papers
Universitas Islam Riau on 2025-07-22 <1%

11 Internet
journals.unihaz.ac.id <1%

12	Student papers	
Politeknik STIA LAN Jakarta on 2025-10-16		<1%
13	Student papers	
Universitas Islam Riau on 2025-07-28		<1%
14	Student papers	
Universitas Jenderal Achmad Yani on 2025-07-22		<1%
15	Student papers	
Universitas Binawan on 2025-10-17		<1%
16	Student papers	
Universitas Papua on 2025-11-05		<1%
17	Internet	
plj.ac.id		<1%
18	Internet	
repo.apmd.ac.id		<1%
19	Internet	
ejournal.aripi.or.id		<1%
20	Internet	
ejurnal.budiutomomalang.ac.id		<1%
21	Publication	
Yosef Budiman, Yadi Suryadi, Asep Suryana, Johar Permana, Eka Prihatin. "Optimi...		<1%
22	Internet	
journal.yrpipku.com		<1%
23	Internet	
ojs.ukipaulus.ac.id		<1%
24	Internet	
repository.unupurwokerto.ac.id		<1%
25	Publication	
Nadia Ardiyanti Sutrisno, Shelvia Retha Sofiana, Nafiisha Nuurfathina. "EFEKTIVIT...		<1%

26 Student papers
Universitas Islam Riau on 2025-07-24 <1%

27 Student papers
Universitas Negeri Makassar on 2013-07-24 <1%

28 Internet
ejournal.yasin-alsys.org <1%

29 Internet
repository.karyailmiah.trisakti.ac.id <1%

30 Internet
www.jurnalp4i.com <1%

31 Publication
Moeliono M., Wollenberg E, Limberg G., eds.. "Desentralisasi tata kelola hutan: p... <1%

32 Student papers
Universitas Djuanda on 2025-11-19 <1%

33 Student papers
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo on 2023-04-02 <1%

34 Student papers
Universitas Tidar on 2025-05-24 <1%

35 Internet
binajurnal.bogorkab.go.id <1%

36 Internet
jurnal.peneliti.net <1%

37 Student papers
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) on 2025-10-07 <1%

38 Student papers
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2026-04-03 <1%

39 Publication
Widya Arif Sofyan Kurniawan, Thomas Stefanus Kaihatu, Timotius Febry Christian... <1%

40 Student papers

STKIP PGRI Sumenep on 2025-11-29 <1%

Dinamika Tata Kelola Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Mario

Yenni Bahar Said[1)], Muh. Rohady Ramadhan[2)], Sandi Lubis[3)]

Abstrak

Penyediaan layanan air bersih merupakan layanan publik dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan berimplikasi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik penyediaannya di tingkat desa sering menghadapi berbagai tantangan tata kelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika tata kelola pemerintah desa dalam penyediaan layanan air bersih di Desa Mario, Kabupaten Sidenreng Rappang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan model tata kelola yang adaptif dan partisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola air bersih dibentuk melalui praktik *policy co-creation* yang melibatkan pemerintah desa, unit pengelola, dan masyarakat secara kolaboratif. Tata kelola berlangsung secara adaptif melalui koordinasi informal dan responsivitas terhadap kebutuhan warga, meskipun menghadapi keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Keberlanjutan layanan sangat ditentukan oleh kapasitas kolaboratif, partisipasi masyarakat, serta peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam penciptaan nilai publik.

Kata Kunci: Tata kelola desa; layanan air bersih; pembuatan kebijakan bersama; pelayanan publik; partisipasi masyarakat

Abstract

The provision of clean water services is a fundamental public service under the responsibility of village governments and has direct implications for community welfare. However, its implementation at the village level often encounters governance challenges. This study aims to analyze the governance dynamics of the village government in delivering clean water services in Mario Village, Sidenreng Rappang Regency, identify supporting and inhibiting factors, and formulate an adaptive and participatory governance model. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document review, and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana interactive analysis model supported by NVivo software. The findings reveal that clean water governance is shaped by policy co-creation practices involving the village government, management units, and the community collaboratively. Governance operates adaptively through informal coordination and responsiveness to residents' needs, despite infrastructure and budget limitations. Service sustainability is largely determined by collaborative capacity, community participation, and the village government's role as a facilitator in creating public value.

Keywords: *Village governance; clean water services; policy co-creation; public services; community participation*

PENDAHULUAN

Penyediaan air bersih merupakan layanan publik dasar yang memiliki implikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta kualitas pembangunan sosial di tingkat lokal (Siti, 2018). Di Indonesia, tanggung jawab penyelenggaraan layanan dasar tersebut semakin diperkuat melalui kerangka desentralisasi, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan pemerintah desa sebagai aktor strategis dalam penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyediaan layanan air bersih di wilayah pedesaan masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan, seperti keterbatasan infrastruktur, lemahnya kapasitas kelembagaan pengelola, serta perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis data dan kebutuhan masyarakat (Avessina et al., 2025; Herawati et al.,

2021; Rauf, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyediaan layanan air bersih tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana teknis, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang mampu mengintegrasikan kapasitas institusi, koordinasi antaraktor, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam praktik penyediaan layanan air bersih di Desa Mario, Kabupaten Sidenreng Rappang. Temuan awal penelitian menunjukkan bahwa tata kelola layanan air bersih di desa ini masih menghadapi sejumlah keterbatasan kelembagaan, antara lain belum optimalnya perencanaan berbasis data, struktur kelembagaan pengelola air bersih yang relatif lemah, serta mekanisme koordinasi antaraktor yang belum terlembaga secara formal. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan layanan cenderung bersifat situasional dan lebih banyak terjadi melalui mekanisme komunikasi informal. Kondisi tersebut menciptakan dinamika tata kelola yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam memahami bagaimana pemerintah desa, pengelola layanan, dan masyarakat berinteraksi dalam merespons keterbatasan sumber daya dan menjaga keberlanjutan layanan air bersih di tingkat lokal.

Sejumlah penelitian sebelumnya mengenai layanan air bersih di tingkat desa umumnya lebih banyak menyoroti aspek teknis penyediaan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan formal (Setiawan et al., 2022; Willetts et al., 2022). Meskipun penting, pendekatan tersebut sering kali belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana layanan publik tetap dapat berjalan dalam konteks desa yang memiliki keterbatasan institusional. Dalam perspektif *New Public Service*, pelayanan publik dipahami sebagai proses kolaboratif yang melibatkan interaksi antara pemerintah dan warga dalam menciptakan nilai publik melalui praktik partisipasi dan kerja sama multipihak. Perspektif ini membuka ruang analisis mengenai bagaimana praktik *policy co-creation* dan interaksi informal antaraktor dapat berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam mengatasi keterbatasan struktural tata kelola di tingkat desa (Faruq et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah kajian dengan menelaah dinamika tata kelola penyediaan layanan air bersih melalui pendekatan yang menekankan pada interaksi aktor, proses kolaboratif, serta pembentukan nilai publik dalam konteks lokal (Widiono et al., 2024).

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tata kelola pemerintah desa dalam penyediaan layanan air bersih di Desa Mario, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaannya, serta merumuskan model tata kelola yang lebih adaptif dan partisipatif untuk mendukung keberlanjutan layanan publik di tingkat desa. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai lokal governance dan pelayanan publik desa, khususnya dalam memahami bagaimana praktik kolaboratif dan interaksi antaraktor membentuk penyediaan layanan dasar di tingkat lokal. Secara praktis, temuan penelitian ini juga memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait dalam memperkuat tata kelola layanan air bersih yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan (Thapa et al., 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka teoretis diperlukan untuk menganalisis tata kelola penyediaan layanan air bersih di tingkat desa. Kerangka teoretis ini harus memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip normatif tata kelola serta dinamika interaksi antara aktor dalam proses pelayanan publik. Oleh karena itu, paradigma *New Public Service* (NPS) dan perspektif *Good Governance* digunakan sebagai landasan analisis yang saling melengkapi.

1. Tata Kelola Pemerintahan Desa dan *Good Governance*

Tata kelola pemerintahan desa merujuk pada proses penyelenggaraan kewenangan lokal yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas (Andi, 2025). Prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator normatif dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan pelayanan publik. Transparansi menekankan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sementara

akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik (Istifazhuddin, 2025). Partisipasi berfungsi memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat, sedangkan efektivitas dan responsivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam memberikan layanan yang tepat guna dan adaptif terhadap dinamika lokal (Sanchez-hernandez et al., 2021).

Dalam kerangka otonomi desa, kualitas tata kelola menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penyediaan layanan dasar, termasuk air bersih. Dengan demikian, *Good Governance* menyediakan kerangka normatif mengenai bagaimana tata kelola seharusnya dijalankan dalam konteks pemerintahan desa (Yulianti, 2023).

2. Pelayanan Publik dalam Perspektif *New Public Service* (NPS)

Paradigma *New Public Service* (NPS) mengutamakan aspek relasional dan prosesual dalam pelayanan publik. Ini membedakannya dari pendekatan normatif *Good Governance*. Pemerintah diposisikan sebagai fasilitator untuk melayani warga (melayani warga) melalui proses diskusi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat (Rønshaugen et al., 2024). Menurut perspektif ini, pelayanan publik adalah hasil dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan nilai publik, bukan hasil dari administrasi. Konsep *co-production*, juga dikenal sebagai *co-creation*, sangat penting untuk NPS karena masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan yang diberikan (Edelmann, 2021). Metode ini menekankan bahwa keberlanjutan layanan publik sangat dipengaruhi oleh seberapa baik hubungan kolaboratif antara pemerintah dan warga (Nuamcharoen, 2024).

Secara konseptual, *Good Governance* dan *New Public Service* setuju bahwa partisipasi, akuntabilitas, dan fokus pada kepentingan publik adalah prioritas utama. Meskipun demikian, kedua perspektif tersebut saling melengkapi karena mereka bekerja pada tingkat analisis yang berbeda. Sementara NPS menjelaskan cara orang berinteraksi dan proses sosial yang memungkinkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang ideal, *Good Governance* memberikan kerangka normatif yang menjelaskan prinsip-prinsip ideal tersebut (Kalalo et al., 2023).

Dengan kata lain, praktik *co-production* dalam NPS membentuk prinsip partisipasi dalam *Good Governance*, dan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pelayanan mewujudkan akuntabilitas dan tanggung jawab (Abdallah et al., 2024). Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, kita dapat melakukan analisis yang lebih menyeluruh tentang standar kualitas tata kelola. Ini juga memungkinkan kita untuk memahami cara antaraktor lokal bekerja sama untuk menerapkannya. Kombinasi kedua kerangka ini penting untuk penyediaan layanan air bersih di desa karena mereka dapat menjelaskan bahwa keberhasilan layanan tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip tata kelola formal, tetapi juga pada kemampuan aktor lokal untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan menyesuaikan diri dengan kendala yang ada (Bhattarai et al., 2023). Oleh karena itu, *Good Governance* memberikan kerangka struktural dan normatif untuk menjalankan tata kelola pemerintahan desa, sementara *New Public Service* (NPS) memberikan dimensi praksis yang menjiwai melalui kerja sama, keterlibatan, dan interaksi antara antaraktor dalam pembentukan nilai publik (Refania' et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji tata kelola penyediaan layanan air bersih di Desa Mario. Penelitian dilaksanakan pada Desember 2025 di Desa Mario, Kabupaten Sidenreng Rappang. Serangkaian kegiatan lapangan yang melibatkan interaksi langsung dengan Penelitian ini melibatkan delapan informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan dan pemanfaatan layanan air bersih di Desa Mario. Informan penelitian berjumlah lima orang yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan layanan air bersih, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, satu pengelola unit air bersih, dan dua tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi

partisipatif, dan studi dokumentasi. Dokumen yang dianalisis meliputi APBDes, RKPDes, laporan teknis, dan arsip kelembagaan desa (Avessina et al., 2025).

Proses analisis dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data berlangsung, mengikuti model analisis interaktif oleh Miles et al (2014) yang mencakup pengorganisasian dan penyaringan data lapangan, pengembangan kategori tematik, serta interpretasi temuan secara iterative untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai tata kelola air bersih. Proses pengodean data dibantu menggunakan perangkat lunak NVivo. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, serta *member checking* untuk memastikan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Pengodean Data Wawancara

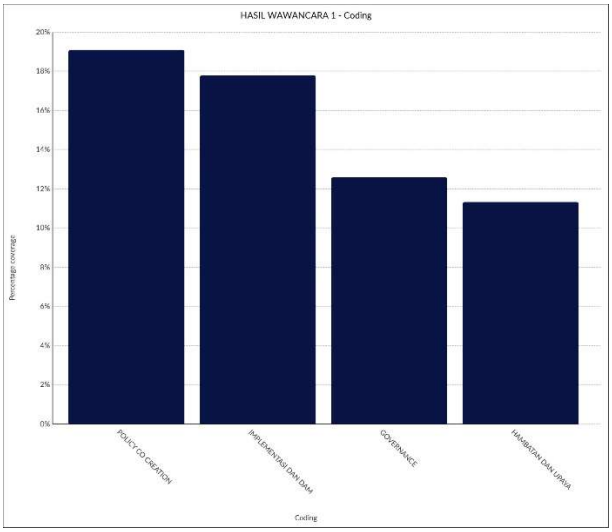

Gambar 1. Hasil Pengkodean Data Wawancara
Sumber: Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan hasil pengodean data wawancara menggunakan perangkat lunak NVivo sebagaimana ditunjukkan pada visualisasi persentase *coding*, penelitian ini mengidentifikasi empat tema utama yang membentuk dinamika tata kelola penyediaan layanan air bersih di Desa Mario, yaitu *Policy Co-Creation*, *Governance*, Implementasi dan Dampak, serta Hambatan dan Upaya. Distribusi pengodean menunjukkan bahwa tema *Policy Co-Creation* memiliki persentase kemunculan tertinggi sekitar 19%, diikuti oleh tema **I**mplementasi dan Dampak sebesar 17,8%, *Governance* sebesar 12,5%, serta Hambatan dan Upaya sekitar 11,3%. Pola ini menunjukkan bahwa diskursus informan lebih banyak menekankan pada proses interaksi dan kolaborasi antaraktor dalam penyediaan layanan air bersih dibandingkan pada aspek kelembagaan formal semata. Temuan ini penting karena mengindikasikan bahwa praktik penyediaan air bersih di Desa Mario tidak sepenuhnya dibentuk oleh mekanisme kebijakan formal yang bersifat *top-down*, melainkan berkembang melalui proses interaksi antara pemerintah desa, unit pengelola layanan, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dengan kata lain, tata kelola layanan air bersih di desa lebih mencerminkan proses sosial dan kolaboratif dibandingkan sekadar implementasi kebijakan administratif. Dari perspektif tata kelola publik, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pelayanan air bersih di tingkat desa seringkali berkembang melalui mekanisme adaptif berbasis relasi sosial dan komunikasi informal, terutama ketika kapasitas kelembagaan formal masih terbatas. Hasil ini sejalan dengan pandangan tentang tata kelola kolaboratif dalam *struktur New Public Service*, yang menekankan betapa pentingnya antaraktor bekerja sama dan bekerja sama sebagai mekanisme utama dalam penyediaan layanan publik di tingkat lokal.

Policy Co-Creation dalam Penyediaan Layanan Air Bersih

Gambar 2. Hasil Analisis *Policy Co-Creation*
Sumber: Diolah Penulis, 2026

Tema *Policy Co-Creation* muncul sebagai dimensi paling dominan dalam hasil pengodean, yang menunjukkan bahwa proses pembentukan kebijakan dan pengelolaan layanan air bersih di Desa Mario sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dan aktor lokal. Hasil analisis *word cloud* memperlihatkan kata-kata kunci seperti masyarakat, layanan, pengelola, pemerintah,

partisipasi, dan perbaikan, yang menggambarkan bahwa relasi antara pemerintah desa dan masyarakat bersifat interaktif. Dalam praktiknya, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pihak yang aktif menyampaikan informasi mengenai kondisi distribusi air, kerusakan jaringan, maupun kebutuhan perbaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan desa, diketahui bahwa laporan masyarakat sering menjadi sumber utama bagi pengelola untuk mengetahui gangguan teknis di lapangan.

> "Biasanya kami tahu ada kerusakan itu dari laporan warga. Jadi, kalau ada yang mengeluh air tidak mengalir, kami langsung cek dan jadikan itu prioritas perbaikan." (Hasil Wawancara, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan layanan air bersih sangat bergantung pada informasi yang berasal dari masyarakat sebagai pengguna layanan langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan air bersih di desa tidak sepenuhnya dirumuskan melalui mekanisme birokratis formal, tetapi berkembang melalui interaksi antara pengalaman masyarakat dan respons pemerintah desa. Dalam konteks ini, masyarakat berfungsi sebagai aktor yang turut berkontribusi dalam proses produksi layanan publik, bukan hanya sebagai penerima manfaat.

Dari perspektif teori *New Public Service*, praktik tersebut mencerminkan konsep *co-production* atau *co-creation*, di mana warga negara dilibatkan secara aktif dalam proses pelayanan publik. Paradigma ini menekankan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah, tetapi juga pada kemampuan membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, dominannya tema *policy co-creation* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan layanan air bersih di Desa Mario sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas komunikasi antara pengelola dan warga. Temuan ini sekaligus menjelaskan bahwa praktik tata kelola di tingkat desa seringkali lebih efektif ketika kebijakan dikembangkan melalui proses dialog dan kolaborasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dimensi Governance dalam Tata Kelola Air Bersih Desa

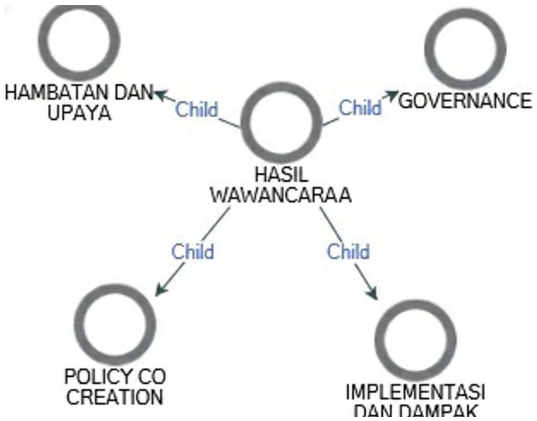

Gambar 3. Hasil Pemetaan Relasi Antartema
Sumber: Diolah Penulis, 2026

Hasil pemetaan relasi antartema menunjukkan bahwa dimensi *governance* berperan sebagai simpul penghubung antara proses *policy co-creation* dan implementasi layanan air bersih di Desa Mario. Pemerintah desa berperan sebagai koordinator yang menjembatani kepentingan masyarakat, unit pengelola, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Koordinasi pengelolaan air bersih umumnya dilakukan melalui komunikasi langsung antara aparat desa, pengelola layanan, dan masyarakat ketika terjadi gangguan distribusi atau kebutuhan perbaikan jaringan. Informasi terkait kondisi layanan juga disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, meskipun mekanisme transparansi tersebut masih bersifat sederhana. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik tata kelola layanan air bersih di Desa Mario masih bersifat adaptif dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam mekanisme formal. Pola koordinasi yang berkembang lebih banyak bertumpu pada relasi sosial, komunikasi langsung, serta respons situasional antaraktor. Dalam perspektif tata kelola publik, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk *informal governance*, yaitu praktik pengelolaan yang berkembang di luar struktur kelembagaan formal namun tetap berfungsi dalam mengoordinasikan tindakan kolektif. Keberadaan mekanisme informal ini menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas institusional tidak selalu menghambat

penyelenggaraan layanan publik, melainkan mendorong munculnya pola koordinasi yang fleksibel dan kontekstual. Namun demikian, ketergantungan pada praktik informal juga berpotensi menimbulkan kerentanan dalam aspek akuntabilitas dan keberlanjutan layanan apabila tidak diimbangi dengan penguatan kelembagaan formal.

Implementasi Kebijakan dan Dampaknya terhadap Layanan Air Bersih

Tema implementasi dan dampak menunjukkan bagaimana kebijakan pengelolaan air bersih dijalankan serta dirasakan langsung oleh masyarakat. Implementasi layanan dilakukan oleh unit pengelola desa yang bertanggung jawab terhadap distribusi air, pemeliharaan jaringan, serta penanganan gangguan teknis seperti kerusakan pipa atau gangguan listrik. Dalam praktiknya, kualitas layanan lebih banyak dinilai dari kemampuan pengelola merespons keluhan masyarakat secara cepat. Respons terhadap laporan warga menjadi indikator penting bagi masyarakat dalam menilai efektivitas layanan air bersih di desa.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan air bersih di Desa Mario bersifat situasional dan *problem-solving*, menyesuaikan dengan kondisi lapangan serta keterbatasan sumber daya desa. Dengan demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan formal, tetapi juga oleh kemampuan aktor lokal dalam mengadaptasi kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Hambatan dan Upaya dalam Pengelolaan Air Bersih

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi keberlanjutan layanan air bersih di Desa Mario, terutama keterbatasan infrastruktur, kerusakan jaringan distribusi, gangguan pasokan listrik, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan. Kendala tersebut menyebabkan pengelola sering menghadapi kesulitan dalam melakukan perbaikan jaringan secara permanen. Meskipun demikian, pemerintah desa dan unit pengelola menunjukkan berbagai upaya adaptif untuk menjaga keberlanjutan layanan, seperti melakukan perbaikan sementara, meningkatkan koordinasi dengan masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya lokal dalam proses pemeliharaan jaringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan layanan air bersih di desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga pada kapasitas adaptif aktor lokal dalam merespons permasalahan, mengelola sumber daya secara kolektif, serta membangun praktik kolaboratif sebagaimana ditekankan dalam perspektif *New Public Service*

Integrasi *Policy Co-Creation*, *Governance*, dan Implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika tata kelola penyediaan layanan air bersih di Desa Mario terbentuk melalui keterkaitan antara *policy co-creation*, *governance*, dan implementasi kebijakan yang saling memengaruhi. *Policy co-creation* tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi distribusi air, gangguan jaringan, serta kebutuhan perbaikan layanan. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah desa dan unit pengelola dalam menentukan langkah operasional.

Dimensi *governance* berperan sebagai mekanisme koordinasi yang menghubungkan proses perumusan kebijakan dengan implementasi di lapangan. Pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan masyarakat, pengelola teknis, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki desa. Integrasi antara kedua dimensi tersebut tercermin dalam implementasi layanan air bersih yang bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan layanan air bersih di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusi formal, tetapi juga oleh kemampuan kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola layanan secara responsif dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa, unit pengelola, dan masyarakat bekerja sama

untuk membangun tata kelola penyediaan layanan air bersih di Desa Mario. Proses pengelolaan tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme formal; sebaliknya, itu dibentuk melalui kolaborasi dalam pembuatan undang-undang, komunikasi informal, dan partisipasi masyarakat dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan.

Keberlangsungan layanan dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa keterlibatan masyarakat dan koordinasi antaraktor, serta faktor penghambat seperti keterbatasan infrastruktur, gangguan teknis, dan keterbatasan anggaran. Dalam konteks tersebut, aktor lokal menunjukkan kapasitas adaptif melalui berbagai upaya responsif, seperti perbaikan sementara, penguatan koordinasi, dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk menjaga keberlanjutan layanan.

Penelitian ini menghasilkan model tata kelola layanan air bersih yang berbasis nilai publik dan kolaborasi. Model ini menekankan fungsi pemerintah desa sebagai fasilitator dan fasilitator partisipasi masyarakat, serta koordinasi adaptif untuk mendukung layanan yang responsif dan berkelanjutan.

Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Mario harus memperkuat institusionalisasi tata kelola layanan air bersih dengan membuat regulasi sistematis yang mencakup prosedur operasi standar (SOP), sistem pengaduan yang terdokumentasi, dan mekanisme pelaporan. Penting juga untuk memprioritaskan peningkatan kemampuan manajemen dan teknis pengelola, terutama dalam hal perencanaan berbasis data, pengelolaan anggaran, dan penanganan gangguan teknis. Untuk meningkatkan keberlanjutan dan akuntabilitas layanan, partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat melalui forum musyawarah dan skema *co-production* yang lebih terorganisir. Di tingkat yang lebih luas, evaluasi keberlanjutan model tata kelola yang dihasilkan diperlukan, termasuk dukungan dari pemerintah daerah serta penelitian lanjutan yang menggunakan metodologi komparatif.

REFERENSI

Abdallah, Z., Rahayu, S., & Herawaty, N. (2024). Implementation of Accountability in Village Fund Management : Systematic Literature Review. *Journal of Multidisciplinary Research*, *3*(7), 3201–3216. https://doi.org/https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i7.9596

Andi, H. N. R. (2025). Strengthening village governance : A qualitative study of transparency , accountability , and participation in village fund management in Tappale Village , Libureng Subdistrict , Bone Regency. *Journal of Government and Development*, *2*(1), 34–49. https://doi.org/10.69816/jgd.v2i1.43956

Avessina, M. J., Bimo, W. A., & Firdaus, M. A. (2025). Collaboration on Rural Clean Water Governance : KPSPAM Institutional Capacity Strengthening and Professionalization Program in South Central Timor Regency. *Pengabdian Nusantara*, *3*(2), 74–80. https://doi.org/https://doi.org/10.32832/jpn.v3i2.109

Bhattarai, K., FitzGibbon, J., & Pant, L. (2023). Rethinking collaborative governance to enhance legitimacy co-production: a multipurpose rural–urban water transfer in Nepal. *International Journal of Water Resources Development*, *39*(5), 846–868. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07900627.2023.2218492

Edelmann. (2021). Co-Production of Digital Public Services in Austrian Public Administrations. *MDPI*, *11*(1), 1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/admsci11010022

Faruq, M., Wardiyanto, B., Umpain, S. H., & Toyib, M. (2025). Collaboration of Stakeholders and AI in The Implementation of New Public Service in The Digital Era. *Golden Ratio of Human Resource Management*, *5*(1), 63–70. https://doi.org/https://doi.org/10.52970/grhrm.v5i1.656

Herawati, H., Kartini, Akbar, A. A., & Abdurrahman, T. (2021). Strategy for Realizing Regional Rural Water Security on Tropical

Peatland. *MDPI*, *13*(18), 1–18. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/w13182455

Istifazhuddin. (2025). Evaluation of the implementation of the village fund allocation policy. *Journal of Economic and Sustainable Development*, *2*(1), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.61511/ersud.v2i1.2025.1779

Kalalo, E., Putri, I. N., Mariana, L., & Arifin, A. L. (2023). The influence of public administration science paradigm shift in its realization good governance. *Journal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, *5*(2), 171–178. https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jisop.v5i2.20185

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nuamcharoen, S. (2024). Factors Influencing The Co-Production In Water Management Policies: A Multicase Study In Nan Province And Phayao Province,Thailand. *Journal Humanities, Arts and Social Sciences Studies*, *24*(1), 78–88. https://doi.org/https://doi.org/10.69598/hasss.24.1.264289

Rauf, F. (2024). Analyzing the Influence of Decentralization on Governance Quality and Public Service Delivery in Indonesia. *Journal Social Civilecial*, *2*(2), 99–107. https://doi.org/https://doi.org/10.71435/610496

Refania', S. V., Dede, M. I., & Mochamad, S. (2024). Pelayanan Publik Sebagai Instrumen Perwujudan Good Governance Melalui Pelayanan Administrasi Kependudukan. *Journal Riset Ilmiah*, *1*(8), 585–591. https://doi.org/https://doi.org/10.62335/9msbet72

Rønshaugen, M., Sønderskov, M., & Magnussen, S. F. (2024). Bureaucracies ' Extended Arm in Co - creation : A Study of Institutional Complexity in the Context of Public Services. *Journal of Public Administration*, *28*(3), 65–79. https://doi.org/https://doi.org/10.58235/sjpa.2024.23233

Sanchez-hernandez, M. I., Barriuso, M. C., & Maldonado-briegas, J. J. (2021). Users ' Perceptions of Local Public Water and Waste Services : A Case Study for Sustainable Development. *MDPI*, *14*(11), 17–17. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/en14113120

Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery : Lessons Learned from Decentralized Indonesia. *MDPI*, *10*(12), 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/economies10120323

Siti, C. (2018). Ilmu Administrasi Universitas Kadiri. *Journal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, *2*(2), 57–64. https://doi.org/https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i2

Thapa, D., Farid, M. N., & Prevost, C. (2021). *Governance Drivers of Rural Water Sustainability: Collaboration in Frontline Service Delivery*. World Bank, Washington, DC. https://doi.org/10.1596/1813-9450-9798

Widiono, G. W., Fathurrahman, R., & Wijaksono, J. (2024). Publik Value Creation in Local Government Context: A Bibliometric Analysis. *Journal of Local Government*, *7*(1), 18–36. https://doi.org/https://doi.org/10.22219/logos.v7i1.27473

Willetts, J., Priadi, C., Ombasta, O., Wulandari, D., Imtiyaz, I., Sudhiastiningsih, N. N. S. N., Kohlitz, J., Mills, F., & Listyasari, M. (2022). Co-developing evidence-informed adaptation actions for resilient citywide sanitation: Local government response to climate change in Indonesia. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, *49*(8), 2129–2150. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/23998083221098740

Yulianti, D. (2023). Policy Monitoring and Governance : The Cost- Effectiveness of Community-Based Sanitation Programs in Indonesia. *Journal of Public Affairs*, *7*(1), 1–22.

https://doi.org/10.15760/hgjpa.2023.7.1.6